



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: [Inspektoratpessel@yahoo.co.id](mailto:Inspektoratpessel@yahoo.co.id)

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Painan, 7 Maret 2024

Inspektur,



Rusdiyanto, S.H., M.Hum.

Pembina Utama Muda

NIP 19641112 199203 1 008

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**TAHUN 2023**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	29,06	29,06
2	Pengukuran Kinerja	30,00	26,26	26,36
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,45	12,56
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,17	22,00
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>89,94</b>	<b>89,99</b>
			<b>A</b>	<b>A</b>

No	Catatan
1	Belum adanya Laporan/notulen terhadap hasil monitoring rencana aksi yang telah dilakukan.
2	Belum adanya laporan/notulen hasil monitoring pengukuran kinerja secara periodik.
3	Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
4	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
5	Pemantauan capaian kinerja belum sepenuhnya dilakukan pendalaman yang memadai pada unit kerja/individu.

No	Rekomendasi
1	Agar dibuatkan laporan atau notulen terhadap hasil monitoring rencana aksi.
2	Agar dilakukan monitoring Pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan dengan melampirkan laporan atau notulen secara periodik.
3	Agar dokumen laporan kinerja menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
4	Agar dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
5	Agar pemantauan capaian kinerja dilakukan pendalaman yang memadai pada unit kerja/individu dengan menyajikan target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan dan rekomendasi.

**MATRIKS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN PESIR SELATAN  
TAHUN 2023**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian	Koordinator	Eviden
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Agar dibuatkan laporan atau notulen terhadap hasil monitoring rencana aksi	Sudah dilakukan rapat internal rencana kerja	2 kali rapat	1 Tahun	Sekretaris	Selesai	Kepala Badan	Notulen Rapat dan Dokumentasi
2	Agar dilakukan monitoring Pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan dengan melampirkan laporan atau notulen secara periodik	Telah dibuat laporan capaian kinerja setiap triwulan	Laporan Capaian Kinerja thn 2023	1 Tahun	Sekretaris	Selesai	Kepala Badan	Laporan Capaian Kinerja thn 2023
3	Agar Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan tentang analisis dan evaluasi kinerja dengan realisasi kinerja level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)	Telah dilakukan perbaikan LKJIP BKPSDM Tahun 2023	1 LKJIP Tahun 2023	1 Tahun	Sekretaris	Selesai	Kepala Badan	LKJIP Tahun 2023
4	Agar Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Telah dilakukan perbaikan LKJIP BKPSDM Tahun 2023	1 LKJIP Tahun 2023	1 Tahun	Sekretaris	Selesai	Kepala Badan	LKJIP Tahun 2023
5	Agar Pemantauan capaian kinerja dilakukan pendalaman yang memadai pada unit kerja/individu dengan menyajikan target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan dan rekomendasi.	Melakukan rapat monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Kepala Bidang dan Staf	2 kali rapat	1 Tahun	Sekretaris	Selesai	Kepala Badan	Notulen Rapat dan Dokumentasi

Painan, 15 Mei 2024  
An. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Pesir Selatan  
Sekretaris

**HENDRAWATI, SE**  
NIP. 19720729 200604 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jln. H.Ilyas Yacub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon/Faximile (0756) 22245

Laman : <https://bkpsdm.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : [bkpsdm@pesisirselatankab.go.id](mailto:bkpsdm@pesisirselatankab.go.id)

Pesisir Selatan, 22 Januari 2024

Nomor : 800 / 07 / BKPSDM 2024  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Rapat

Yth. 1. Kepala BKPSDM  
2. Staf BKPSDM  
di  
Tempat

Sehubungan dengan akan diadakannya rapat mengenai Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Aksi, maka dengan ini kami mengundang seluruh staf BKPSDM untuk menghadiri rapat yang akan diadakan pada:

hari/tanggal : Selasa/ 23 Januari 2024  
waktu : 09.00 s/d Selesai  
tempat : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
acara : Rapat Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Aksi

Demikian undangan ini kami sampaikan, mengingat pentingnya acara tersebut maka dimohon kehadirannya tepat waktu. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia

  
Hendrawati, SE  
NIP. 19720729 200604 2 003

## NOTULEN RAPAT

Hari/tanggal : Selasa/ 23 Januari 2024  
Pukul : 09.00 s/d Selesai  
Tempat : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Judul : Rencana Kerja dan Evaluasi rencana Aksi  
Pimpinan Rapat : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dan dikoordinir oleh Sekretaris.
2. Rapat dihadiri oleh Kepala Badan, Skeretaris, Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu, BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Hasil rapat membahas, diantaranya :

Rapat Dibuka oleh Sekretaris Badan dengan memaparkan rencana aski dan selajutnya Kepala Badan memberikan sambutan serta penyampain arahan

- a. Dalam rapat kali ini Kepala Badan Menyampaikan rencana aksi kinerja dapat dijadikan sebagai penyempurnaan perencanaan kinerja Badan BKPSDM
- b. Sesuai dengan indikator kinerja Kepala Tahun 2024 yaitu :
  1. Nilai AKIP BKPSDM
  2. Indeks Profesionalitas ASN
  3. Indeks Merit Sistem
  4. Nilai Kematangan Inovasi BKPSDM

Agar indikator kinerja dapat tercapai maka semua Pegawai harus bisa melakukan pekerjaanya baik dan bertanggungjawab terhadap pekerjaan masing-masing.

- c. Dokumen perencanaan kinerja seperti perjanjian kinerja harus di lakukan evaluasi oleh masing Kepala bagian terhadap bawahannya dengan membuat capaian kinerja setiap bulannya

Demikianlah notulen rapat ini dibuat sehingga rapat tentang .Evaluasi Rencana Aksi dapat dijadikan sebagai perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja Dinas

Painan, 23 Januari 2024

Diketahui:  
Sekretaris BKPSDM



**Hendrawati, SE**  
NIP. 19720729 200604 2 003

Notulis  


**Lendrawati, A.Md**  
NIP. 19810219 200904 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jln. H.Ilyas Yacub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon/Faximile (0756) 22245

Laman : <https://bkpsdm.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : [bkpsdm@pesisirselatankab.go.id](mailto:bkpsdm@pesisirselatankab.go.id)

Pesisir Selatan, 24 Januari 2024

Nomor : 800 / 10 / BKPSDM 2024  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Rapat  
Yth. 1. Sekretaris BKPSDM  
2. Staf Sekretariat

di  
Tempat

Dalam Rangka diadakanya Rapat internal sekretariat , maka bersama ini kami undang seluruh staf Sekretariat untuk hadir pada:

hari/tanggal : Kamis/ 25 Januari 2024  
waktu : 09.00 s/d Selesai  
tempat : Ruang Sekretariat BKPSDM

Demikian disampaikan, atas kehadiran Saudara tepat pada waktunya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia



Hendrawati, SE

NIP. 19720729 200604 2 003

## NOTULEN RAPAT

Hari/tanggal : Kamis/25 Januari 2024  
Pukul : 09.00 s/d Selesai  
Tempat : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Pimpinan Rapat : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

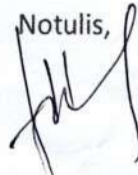
### Kesimpulan Rapat

1. Penetapan target Capaian Kinerja tahun 2024 harus berpedoman kepada capaian kinerja tahun 2023.
2. Untuk penetapan sasaran dan indikator, kita harus mempedomani pohon kinerja, cascading dan Renstra.
3. Untuk tahun 2024, penetapan capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP BKPSDM	A (90)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi BKPSDM	90 (sangat tinggi)
3.	Meningkatnya Daya Saing ASN	Indeks Profesionalitas ASN	70 (sedang)
		Indeks Merit Sistem	255 (baik)

4. Selanjutnya kepada Eselon III, IV dan staf agar menyusun sasaran strategis, indikator sasaran dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
5. Perjanjian Kinerja yang sudah ditandatangani oleh ASN agar dilakukan evaluasi setiap bulannya oleh atasan yang bersangkutan.
6. Bagi Non ASN, agar bekerja sesuai dengan di SK-kan yang merupakan penunjang tugas ASN.

Diketahui:  
Sekretaris BKPSDM  
  
**Hendrawati, SE**  
NIP. 19720729 200604 2 003

Notulis,  
  
**Lendrawati, A.Md**  
NIP. 19810219 200904 2 002



**CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023**  
**PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi (%)	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
				5	6		8	9	10	11
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai RB BKPSDM	B (65)			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.203.119.727		941.856.052	18,10
		Nilai AKIP BKPSDM	A			Program Kepegawaian Daerah	1.134.794.482		104.509.339	9,21
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	91.361.825		3.454.550	3,78
2	Meningkatnya Daya Saing ASN	Indeks Profesionalitas ASN	50			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.203.119.727		941.856.052	18,10
		Indeks Merit Sistem	250			Program Kepegawaian Daerah	1.134.794.482		104.509.339	9,21
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	91.361.825		3.454.550	3,78
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematanjangan Inovasi BKPSDM	100			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.203.119.727		941.856.052	18,10
						Program Kepegawaian Daerah	1.134.794.482		104.509.339	9,21
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	91.361.825		3.454.550	3,78
<b>Total</b>							6.429.276.034		1.049.819.941	16,33



**CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023**  
**PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	3 Nilai RB BKPSDM	4 B (65)	5	6	7 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	8 5.203.119.727	9 5.024.111.336	10 3.866.486.068	11 76,96
		Nilai AKIP BKPSDM	A	A (89,94)	100					
2	Meningkatnya Daya Saing ASN	Indeks Profesionalitas ASN	58			Program Kepegawaian Daerah	1.134.794.482	1.760.207.539	745.676.900	42,36
		Indeks Merit Sistem	250			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	91.361.825	93.600.825	43.390.064	46,36
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi BKPSDM	100	85	85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.203.119.727	5.024.111.336	3.866.486.068	76,96
						Program Kepegawaian Daerah	1.134.794.482	1.760.207.539	745.676.900	42,36
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	91.361.825	93.600.825	43.390.064	46,36
<b>Total</b>							6.429.276.034	6.877.919.700	4.655.553.032	67,69

PAINAN, 01 NOVEMBER 2023  
 ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN  
 PESISIR SELATAN



**CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 4 TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN PESIHR SELATAN**

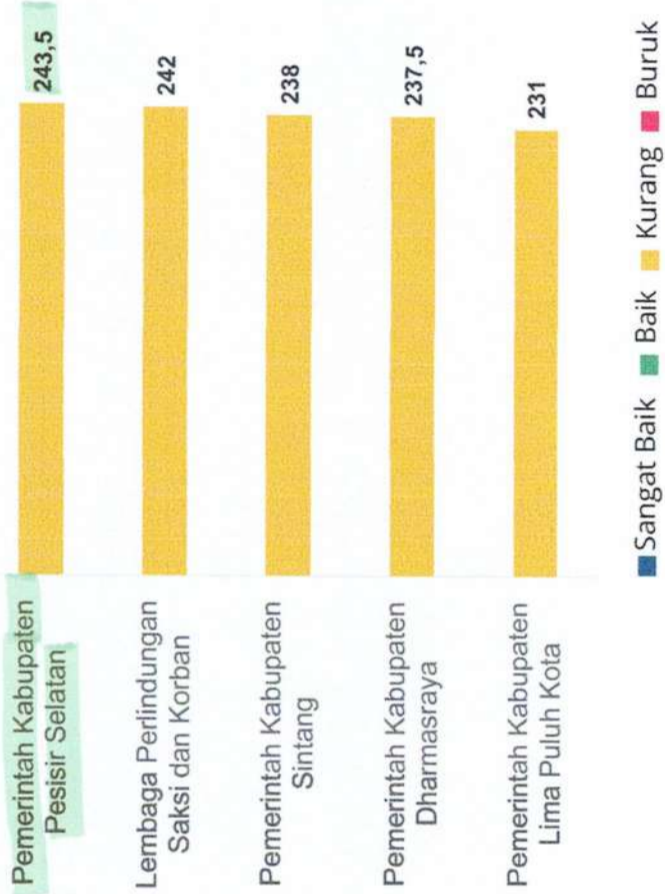
No	Spesifik Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Pencapaian	Capaian %	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian	Crosscutting OPD antar Sekretariat dan Bidang
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP BKPSDM	A (memuaskan)	A (89,94) (memuaskan) "Gita sementara	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Kepegawaian Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.204.111.336 1.760.207.539 93.600.825	4.805.894.607 1.542.736.331 92.727.256	92,35% 87,65% 99,07%	
2	Memingkatnya Daya Saing ASN	Indeks Profesionalitas ASN	58 (sangat rendah)	66,09 (rendah)	113,95%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.204.111.336	4.805.894.607	92,35%	Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN Dengan adanya pertemuan pengaputan indeks profesionalitas ASN pada aplikasi SMPK, berupa SKP, dan sertifikat diklat, bimtek/ dll, sab kegiatan rapat - rapat
3	Memingkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Merit Sistem	250 (baik)	243,5 (kurang)	97,40%	Program Kepegawaian Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.760.207.539 93.600.825	1.542.736.331 92.727.256	87,65% 99,07%	
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.204.111.336	4.805.894.607	92,35%	
						Program Kepegawaian Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.760.207.539 93.600.825	1.542.736.331 92.727.256	87,65% 99,07%	
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.204.111.336	4.805.894.607	92,35%	
						Program Kepegawaian Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.760.207.539 93.600.825	1.542.736.331 92.727.256	87,65% 99,07%	
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.204.111.336	4.805.894.607	92,35%	
						Program Kepegawaian Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.760.207.539 93.600.825	1.542.736.331 92.727.256	87,65% 99,07%	Bidang Pengembangan, Pemberhentian dan Informasi ASN Dengan adanya sosialisasi aplikasi e- pensiun dan lauching pada sub kegiatan rapat - rapat

Palembang, 05 Maret 2024  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESIHR SELATAN**

  
**YOZKI ANDRI S. PURNI**  
 NIP. 19730101 200603 1 003

# HASIL PENILAIAN SISTEM MERIT INSTANSI PEMERINTAH TARGET

(Hasil Penetapan penilaian tahun 2023)

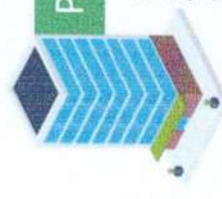


# TOP 5 HASIL PENILAIAN SISTEM MERIT TAHUN 2023



## Kementerian

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (393)
2. Kementerian BUMN (392.5)
3. Kementerian Sekretariat Negara (390)
4. Kementerian Keuangan (390)
5. Kementerian Kesehatan (382.5)



## Provinsi

1. Jawa Barat (396.5)
2. Bali (386.5)
3. Jawa Timur (353)
4. Daerah Istimewa Yogyakarta (349)
5. Jawa Tengah (340.5)



## LPNK

1. BPOM (387.5)
2. BKKBN (378)
3. BPKP (372.5)
4. LKPP (372.5)
5. LAN RI (372)



## Kabupaten/Kota

1. Kota Tangerang (366)
2. Kota Bandung (359.5)
3. Kabupaten Tangerang (350.5)
4. Kabupaten Sijunjung (350)
5. Kabupaten Sumedang (344)

**Listing Nilai IP ASN Tahun 2023 Instansi Wilayah Kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru**  
**Kondisi : 28 Mei 2024**

No	Nama Instansi	Jumlah PNS	Kualifikasi (25)	Kompetensi (40)	Kinerja (30)	Disiplin (5)	Rata Nilai (100)			Kategori
							13 Mei	28 Mei	↑↓	
1	Pemerintah Kota Batam	5.567	20,48	32,56	24,92	4,99	80,75	82,96	2,21	tinggi
2	Pemerintah Kab. Sijunjung	3.273	20,08	22,46	25,26	5,00	72,08	72,80	0,72	sedang
3	Pemerintah Kota Pariaman	2.414	20,65	21,47	24,61	5,00	71,73	71,73	0,00	sedang
4	Pemerintah Kab. Dharmasraya	3.074	20,21	21,44	24,60	5,00	71,23	71,26	0,03	sedang
5	Pemerintah Kota Bukittinggi	2.25	20,53	19,06	25,20	5,00	69,80	69,80	0,00	rendah
6	Pemerintah Kota Pekanbaru	6.183	20,41	20,20	23,48	5,00	59,30	69,10	9,80	rendah
7	Pemerintah Kota Solok	1.882	20,92	17,72	24,73	5,00	47,10	68,38	21,28	rendah
8	Pemerintah Kab. Tanah Datar	4.458	19,98	17,44	24,27	5,00	52,82	66,69	13,87	rendah
9	Pemerintah Kab. Natuna	2.849	20,17	15,25	24,86	5,00	64,83	65,29	0,46	rendah
10	Pemerintah Provinsi Riau	13.736	20,92	15,89	22,80	5,00	55,25	64,60	9,35	rendah
11	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	5.49	20,10	15,17	24,30	5,00	59,98	64,57	4,59	rendah
12	Pemerintah Kota Padang Panjang	1.812	20,54	13,75	24,92	5,00	63,94	64,20	0,26	rendah
13	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	4.947	20,84	13,77	24,43	4,99	64,03	64,03	0,00	rendah
14	Pemerintah Kab. Pasaman	3.732	20,16	14,24	23,75	5,00	61,35	63,15	1,80	rendah
15	Pemerintah Kota Tanjungpinang	2.956	20,42	12,07	24,93	5,00	62,26	62,42	0,16	rendah
16	Pemerintah Kota Dumai	3.74	20,51	11,73	24,92	5,00	61,35	62,15	0,80	rendah
17	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	4.837	20,02	12,62	24,28	5,00	61,89	61,91	0,02	rendah
18	Pemerintah Kota Padang	7.396	20,38	11,80	24,25	5,00	58,70	61,42	2,72	rendah
19	Pemerintah Kota Payakumbuh	2.578	20,50	10,52	25,16	5,00	59,64	61,17	1,53	rendah
20	Pemerintah Kab. Agam	5.243	20,03	12,14	23,96	5,00	61,10	61,13	0,03	rendah
21	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	1.752	20,32	13,37	22,03	5,00	60,03	60,72	0,69	sangat rendah
22	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	5.477	19,93	10,85	24,57	5,00	59,95	60,35	0,40	sangat rendah
23	Pemerintah Kab. Solok Selatan	3.217	20,49	9,75	25,10	5,00	60,29	60,34	0,05	sangat rendah
24	Pemerintah Kota Sawahlunto	1.917	20,50	9,70	24,85	5,00	58,74	60,05	1,31	sangat rendah
25	Pemerintah Kab. Pelalawan	4.313	20,25	11,59	23,15	5,00	53,60	59,98	6,38	sangat rendah
26	Pemerintah Kab. Solok	4.634	19,88	11,69	23,40	5,00	59,93	59,97	0,04	sangat rendah
27	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	6.451	19,90	12,51	22,09	5,00	55,71	59,50	3,79	sangat rendah
28	Pemerintah Kab. Kampar	7.209	19,90	11,71	22,82	5,00	54,77	59,43	4,66	sangat rendah
29	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	4.827	19,74	12,40	21,27	5,00	58,37	58,42	0,05	sangat rendah
30	Pemerintah Kab. Bengkalis	6.233	20,36	8,75	24,15	5,00	58,23	58,26	0,03	sangat rendah
31	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	4.224	20,18	11,84	21,12	5,00	58,06	58,15	0,09	sangat rendah
32	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	5.739	20,28	9,10	23,60	5,00	57,97	57,98	0,01	sangat rendah
33	Pemerintah Kab. Siak	5.289	20,38	8,72	23,61	5,00	52,16	57,71	5,55	sangat rendah
34	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	5.048	20,06	11,59	21,00	5,00	57,59	57,66	0,07	sangat rendah
35	Pemerintah Kab. Karimun	3.703	19,97	8,34	23,48	5,00	56,55	56,79	0,24	sangat rendah
36	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	16.171	20,66	10,53	20,22	5,00	54,67	56,41	1,74	sangat rendah
37	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	5.187	20,10	9,85	21,22	5,00	56,07	56,18	0,11	sangat rendah
38	Pemerintah Kab. Bintan	2.886	20,05	7,63	22,62	5,00	55,06	55,30	0,24	sangat rendah
39	Pemerintah Kab. Lingga	2.697	20,18	9,42	19,84	5,00	54,18	54,44	0,26	sangat rendah
40	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	2.688	20,19	7,47	19,49	5,00	51,97	52,15	0,18	sangat rendah
41	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	2.413	20,25	7,44	12,29	5,00	44,70	44,97	0,27	sangat rendah
	<b>TOTAL</b>	<b>179.012</b>	<b>20,28</b>	<b>13,31</b>	<b>23,21</b>	<b>5,00</b>	<b>59,46</b>	<b>61,79</b>	<b>↑ 2,34</b>	<b>rendah</b>

NB. Data Resmi IP ASN 2023 adalah data yang diterbitkan oleh Kedeputusan PMK BKN

Ket. Kategori :  
91-100 : Sangat Tinggi  
81-90 : Tinggi  
71-80 : Sedang  
61-70 : Rendah  
0-60 : Sangat Rendah



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII**

Jalan Hangtuah Ujung Nomor 148 Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau 28285  
Telepon (0761) 7870006; Faksimile (0761) 46104  
Laman: pekanbaru.bkn.go.id; Pos-el: kanreg12.pekanbaru@bkn.go.id

---

Nomor : 1097/B-BJ.03.02/SD/KR.XII/2023 Pekanbaru, 25 Oktober 2023  
Sifat : BIASA  
Lampiran : 2 (dua) Berkas  
Hal : Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN  
Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Yth. Kepala BKD/BKPSDM/BKPP  
(Daftar Instansi Terlampir)  
Di  
Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Jabatan ASN Nomor 221.J/BM.02/SD/C.II/2023 tanggal 10 Oktober 2023 perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional BKN, Bersama ini kami sampaikan laporan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 di Instansi Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru



Anna Hasnah Hasaruddin

Tembusan kepada Yth:

1. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Pusat;
2. Direktur Jabatan ASN BKN Pusat.

KANTOR REGIONAL XII BKN

Lampiran I Surat Dinas

Nomor : 1097/B-BJ.03.02/SD/KR.XII/2023

Tanggal : 25 Oktober 2023

**DAFTAR INSTANSI**

<b>No</b>	<b>Instansi Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota</b>
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2	Pemerintah Provinsi Riau
3	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
4	Pemerintah Kab. Siak
5	Pemerintah Kab. Kampar
6	Pemerintah Kota Pekanbaru
7	Pemerintah Kab. Bengkalis
8	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
9	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
10	Pemerintah Kab. Rokan Hilir
11	Pemerintah Kab. Rokan Hulu
12	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
13	Pemerintah Kab. Pelalawan
14	Pemerintah Kota Dumai
15	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
16	Pemerintah Kota Batam
17	Pemerintah Kota Tanjungpinang
18	Pemerintah Kab. Natuna
19	Pemerintah Kab. Lingga
20	Pemerintah Kab. Bintan
21	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
22	Pemerintah Kab. Karimun
23	Pemerintah Kota Padang
24	Pemerintah Kab. Tanah Datar
25	Pemerintah Kab. Solok

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

No	Instansi Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota
26	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
27	Pemerintah Kab. Agam
28	Pemerintah Kab. Sijunjung
29	Pemerintah Kab. Solok Selatan
30	Pemerintah Kota Bukittinggi
31	Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota
32	Pemerintah Kab. Padang Pariaman
33	Pemerintah Kota Padang Panjang
34	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
35	Pemerintah Kota Pariaman
36	Pemerintah Kab. Dharmasraya
37	Pemerintah Kab. Pasaman
38	Pemerintah Kab. Pasaman Barat
39	Pemerintah Kota Solok
40	Pemerintah Kota Payakumbuh
41	Pemerintah Kota Sawahlunto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KANTOR REGIONAL XII BKN

Lampiran II Surat Dinas

Nomor : 1097/B-BJ.03.02/SD/KR.XII/2023

Tanggal : 25 Oktober 2023

HASIL PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN TAHUN 2022  
 Nilai Rata-Rata Per Dimensi di Instansi Wilayah Kerja  
 Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

JUMLAH INSTANSI	JUMLAH PNS YANG DIUKUR	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI INDEKS	KATEGORI
41	189.237	21,18	14,78	21,44	5,00	62,40	Rendah

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Instansi  
 di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

NAMA INSTANSI	JUMLAH PNS YANG DIUKUR	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI	KATEGORI
Pemerintah Kota Bukittinggi	2.184	20,97	37,51	25,03	5,00	88,51	Tinggi
Pemerintah Kota Pamanan	2.293	21,35	34,66	24,95	5,00	85,96	Tinggi
Pemerintah Kab. Sijunjung	3.217	21,19	31,79	25,20	5,00	83,18	Tinggi
Pemerintah Kab. Tanah Datar	4.662	21,21	28,63	24,96	4,99	79,79	Sedang
Pemerintah Kota Batam	5.286	21,02	28,20	24,93	4,99	79,14	Sedang
Pemerintah Kota Pekanbaru	6.080	21,21	29,08	23,09	5,00	78,38	Sedang
Pemerintah Kota Padang Panjang	1.780	20,93	26,39	25,00	5,00	77,32	Sedang
Pemerintah Kab. Dharmasraya	3.068	21,31	21,04	24,36	5,00	71,71	Sedang
Pemerintah Provinsi Riau	13.866	21,61	17,06	24,66	5,00	68,33	Rendah
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	5.451	21,42	15,51	24,16	5,00	66,09	Rendah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NAMA INSTANSI	JUMLAH PNS YANG DIUKUR	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI	KATEGORI
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	4.664	21,51	14,19	24,87	4,99	65,56	Rendah
Pemerintah Kab. Agam	5.192	21,29	14,24	24,95	5,00	65,48	Rendah
Pemerintah Kab. Natuna	2.672	20,85	14,70	24,88	5,00	65,43	Rendah
Pemerintah Kota Solok	1.886	21,44	13,23	24,92	5,00	64,59	Rendah
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	1.673	20,19	15,12	24,08	5,00	64,39	Rendah
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	6.365	21,16	14,73	23,42	5,00	64,31	Rendah
Pemerintah Kota Payakumbuh	2.652	21,08	13,42	24,64	5,00	64,14	Rendah
Pemerintah Kab. Pasaman	3.773	21,24	12,49	24,92	5,00	63,65	Rendah
Pemerintah Kab. Pelalawan	4.409	21,22	12,07	24,88	5,00	63,17	Rendah
Pemerintah Kota Padang	7.408	21,28	11,21	24,82	5,00	62,31	Rendah
Pemerintah Kota Dumai	3.710	21,33	11,25	24,55	5,00	62,13	Rendah
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	4.287	21,36	10,95	24,75	5,00	62,08	Rendah
Pemerintah Kab. Solok	4.452	21,30	10,32	24,98	5,00	61,60	Rendah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	16.381	21,62	11,11	23,73	5,00	61,46	Rendah
Pemerintah Kota Sawahlunto	1.952	21,09	10,31	24,87	4,99	61,28	Rendah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NAMA INSTANSI	JUMLAH PNS YANG DIUKUR	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI	KATEGORI
Pemerintah Kota Tanjungpinang	2.853	21,02	11,20	23,56	5,00	60,78	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Solok Selatan	3.167	21,45	9,00	25,01	5,00	60,46	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	4.697	21,14	9,73	24,16	5,00	60,03	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	5.382	21,28	11,10	22,13	5,00	59,51	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Karimun	3.561	20,94	8,07	24,73	5,00	59,74	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Bintan	2.882	20,96	7,42	24,63	5,00	58,01	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	5.097	21,37	10,89	19,68	5,00	56,93	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	5.747	21,16	9,65	18,84	5,00	54,65	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Kampar	7.258	21,36	11,22	17,02	5,00	54,60	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Lingga	2.564	21,07	8,41	17,59	5,00	52,07	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	4.675	21,18	10,07	9,99	5,00	46,24	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	2.697	21,12	6,98	12,41	5,00	45,51	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	5.155	21,04	9,64	6,93	5,00	42,51	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Bengkalis	6.381	21,23	8,39	6,60	5,00	41,22	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Siak	5.383	20,76	8,51	5,12	5,00	39,39	Sangat Rendah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 800/049/BKPSDM-2023

TENTANG

**TIM PEMBANGUNAN SISTEM MERIT DALAM  
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara baik, terencana, terarah dan sistematis perlu dibentuk tim pembangunan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
6. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 986);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG TIM PEMBANGUNAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA...

- KETIGA** : Tim Pembangunan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- Mengkoordinasikan penyusunan *road map* penerapan sistem merit;
  - Membahas perkembangan *road map* penerapan sistem merit pada setiap aspek sistem merit;
  - Melakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit;
  - Melaporkan dan mengkonsultasikan hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit; dan
  - Melaporkan hasil penilaian mandiri kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT** Tim Pembangunan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibagi ke dalam Kelompok Kerja (POKJA) yang terdiri atas :
- Kelompok Kerja Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan ASN
  - Kelompok Kerja Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi.
  - Kelompok Kerja Manajemen Kinerja.
  - Kelompok Kerja Penggajian, Penghargaan dan Disiplin.
  - Kelompok Kerja Perlindungan dan Pelayanan.
  - Kelompok Kerja Sistem Informasi.
- KELIMA** : Semua pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pembangunan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Tanggal : 02 Februari 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
- Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
- Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/049/BKPSDM-2023

TANGGAL : 02 FEBRUARI 2023

TENTANG : TIM PEMBANGUNAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MAWARDI ROSKA, SIP NIP: 19670907 198902 1 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah I
2.	EMIRDA ZIZWATI, S.E., M.M. NIP. 19651111 199003 2 006	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah II
3.	TAMSIR, S.H., M.M. NIP: 19670312 198803 1 003	Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Pelaksana
4.	Dra. RIKO, M.M. NIP.19671006 198903 2 004	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Drs. ADRI, M.Si. NIP: 19680216 198902 1 001	Sekretaris Badan Perencanaan, Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Pesisir Selatan	Anggota
6.	EMILALOVIZA, S.Sos, MM. NIP: 19670927 198903 2 001	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	SUBCHANDRI, SE,M.Si. NIP: 19720416 199903 1 003	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	<b>HENDRAWATI, S.E. NIP.19720729 200604 2 003</b>	<b>Sekretaris BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan</b>	<b>Koordinator Sekretariat</b>
9.	FERA NOFITA SARI, SIP NIP: 19770224 200604 2 012	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota Sekretariat
10.	DERISKA AFNI, S.K.M . NIP: 19860915 201001 2 032	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota Sekretariat
11.	LENDRAWATI, A.Md NIP. 19810219 200904 2002	pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretariat
12.	<b>AFRIANTO, S.E., M.M. NIP: 19780205 200604 1 016</b>	<b>Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian &amp; Informasi ASN pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan</b>	<b>Koordinator Pokja Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan ASN</b>
13.	NOVA LISWANTY, S.E. NIP: 19831108 201001 2 021	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Pokja
14.	DEWI LISTYAWATI, S.Kom. NIP: 19810102 201001 2 019	Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Muda pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Pokja
15.	WINDA DWI GUSTI, SAP NIP: 19940802 201903 2 001	Analisis Kepegawaian Pertama pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Pokja
16.	<b>SYAFRINO, SAP, M.I.Kom NIP. 19840430 200501 1002</b>	<b>Kepala Bidang Mutasi Dan Promosi Aparatur Sipil Negara pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan</b>	<b>Koordinator Pokja Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi</b>
17.	SEPTRIA NEVITA, S.E,M.I.Kom. NIP: 19860913 201101 2 017	Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Muda pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Pokja
18.	RIZKI HANAFI, S.STP. NIP: 19930611 201708 1 004	Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Muda pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Pokja

19.	NOFRIYENTI, S.Sos. NIP: 19771125 200701 2 003	Fungsional Umum pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Pokja
20.	AFTA METRIDO, S.Kom NIP. 19930109 201903 1 001	Pranata Komputer Pertama pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Pokja
21.	<b>AFRIKAL, SH.</b> <b>NIP:19690510 199103 1 010</b>	<b>Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN pada BKPSDM</b>	<b>Koordinator Pokja Manajemen Kinerja</b>
22.	YULWIDYA ISFA PUTRA, S.E., M.Si. NIP: 19830726 201001 1 028	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur / Analisis Kepegawaian Muda pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Pokja
23.	MUHAMAD KADRI, S.A.P. NIP: 19831114 200701 1 003	Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Muda pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Pokja
24.	FONI LANDASARI, SP. NIP: 19840710 201001 2 037	Fungsional Umum pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Pokja
25.	<b>ADE MARLINA, S.Psi., M.Ec.Dev</b> <b>NIP.19830329 200902 2003</b>	<b>Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur / Analisis Kepegawaian Muda pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan</b>	<b>Koordinator Pokja Penggajian, Penghargaan dan Disiplin</b>
26.	ALFIAN HUDA, S.M. NIP: 19960825 201903 1 001	Fungsional Umum / Analisis Diklat pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota/Sekaligus Admin
27.	KARMILA SARI, S.Sos. NIP. 19860420 201001 2 029	Analisis Kepegawaian Muda pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Pokja
28.	ADHA PUPUTUSIA, A.Md. NIP. 19820917 201001 2 007	Fungsional Umum pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Pokja
29.	<b>EFLIZAR M, SH.</b> <b>NIP. 19650505 198602 1 008</b>	<b>Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur / Analisis Kepegawaian Muda pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan</b>	<b>Koordinator Pokja Perlindungan dan Pelayanan</b>
30.	SURYANTO MUCHLIS, S.A.P. NIP. 19960520 201903 1 001	Analisis Kepegawaian Pertama pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Pokja
31.	ELI ERMİ, SE NIP. 19680210 200604 2 003	Fungsional Umum pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Pokja
32.	HARRY YUSMAN, SAP NIP. 19830511 200701 1 001	Analisis Kepegawaian Pertama pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Pokja
33.	<b>MUHAIMIN ZURNA, SE, M.CIO</b> <b>NIP. 19840116 200604 2 003</b>	<b>Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur / Analisis Kepegawaian Muda pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan</b>	<b>Koordinator Pokja Sistem Informasi</b>
34.	BRAHMANA ADIPUTRA, S.Kom NIP. 19941119 201903 1 001	Pranata Komputer Pertama pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Pokja
35.	YUSRI JAPRISKA, SE. NIP: 19850107 200801 1 001	Fungsional Umum pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Pokja
36.	DESI WAHYUNI SYAF, S.AP NIP. 19821202 201001 2 005	Analisis Kepegawaian Pertama pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Pokja

**BUPATI PESISIR SELATAN**



**RUSMA YUL ANWAR**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jln. H.Ilyas Yacub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon/Faximile (0756) 22245

Laman : <https://bkpsdm.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : [bkpsdm@pesisirselatankab.go.id](mailto:bkpsdm@pesisirselatankab.go.id)

Pesisir Selatan, 06 Februari 2024

Nomor : 800 / 12 / BKPSDM 2024  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Rapat

Yth. 1. Kepala BKPSDM  
2. Staf BKPSDM  
di  
Tempat

Dalam Rangka monitoring dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bulan Januari 2024, maka bersama ini kami undang seluruh staf BKPSDM untuk hadir pada:

hari/tanggal : Rabu/ 07 Februari 2024  
waktu : 09.00 s/d Selesai  
tempat : Aula BKPSDM

Demikian disampaikan, atas kehadiran Saudara tepat pada waktunya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia



Hendrawati, SE

NIP. 19720729 200604 2 003

## NOTULEN RAPAT

Hari/tanggal : Rabu, 07 Februari 2024  
Pukul : 09.00 s/d Selesai  
Tempat : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Pimpinan Rapat : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

### Kesimpulan Rapat

1. Agar pelaporan tepat waktu, dalam penginputan program, kegiatan dan sub kegiatan ke aplikasi e-simbangda serta upload eviden, maka PPTK dibantu oleh operator masing-masing bidang/bagian yang ditunjuk, sebagai berikut :
  - Sekretariat : Hendrawati, SE
  - Bidang Pengembangan : Gustin Yulia Roza
  - Bidang Promosi Mutasi : Syafrino
  - Bidang PPIASN : Afrianto
2. Operator e-simbangda harus segera mengentrikan master paket ke aplikasi e-simbangda dengan berkordinasi admin e-simbangda (Sdr. Febri).
3. Dari hasil monitoring dan evaluasi kinerja Bulan Januari 2024 disimpulkan sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET tahun 2024	Target Bulan Januari 2024	Realisasi Bulan Januari 2024	Keterangan
1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP BKPSDM	A (90)	A (89.99)	-	Penilaian oleh Inspektorat
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi BKPSDM	90 (sangat tinggi)	45	45	
3.	Meningkatnya Daya Saing ASN	Indeks Profesionalitas ASN	70 (sedang)	10%	10%	
		Indeks Merit Sistem	255 (baik)	30%	30%	

4. Untuk peningkatan kualitas Inovasi Daerah, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
  - Agar melakukan konsultasi ke Bappeda, dimana Bappeda telah menyediakan Ruang Konsul atau yang diberi nama poliklinik Inovasi.

- Buat Surat Edaran Bupati tentang Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
- Membangun komitmen seluruh ASN Mulai Staf hingga Bidang dengan adanya PK 1 inovasi di BKPSDM
- Tagline inovasi :
  1. Inovasi bukan tujuan, tapi inovasi cara/metode.
  2. Inovasi merubah mindset SDM, bukan soal uang/anggaran
  3. Inovasi bukan program/kegiatan tapi inovasi ada d setiap program/kegiatan
  4. Inovasi bukan ide seorang, tapi inovasi perangkat daerah)

a. Untuk Meningkatkan Daya Saing ASN, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain :

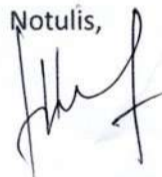
- Mengikuti Zoom Meeting yang telah di sediakan baik oleh KEmenterian maupun dari Propisi, dimana setiap kamis, ada zoom Misbella (Kamis Belajar).
- Di dalam UU juga di amanatkan bahawa setiap ASN harus mengikuti minila 20 JP setiap tahunnya. Hal ini sangat mudah di capai jika tidak adapun Bintek dapat di lakukan dengan Virtual Zoom
- sejatinya peningkatan kualitas dan kapabilitas serta profesionalitas para pegawai ASN sangat ditentukan dari individu pegawai masing-masing. Sebagai contoh, bagaimana seorang pegawai dapat terus termotivasi untuk meningkatkan strata pendidikan, terus bersemangat meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, serta memiliki etos kerja yang baik dan selalu berdisiplin
- Penerapan sistem merit lebih dari sekedar angka dalam penilaian dan tidak semestinya kita terfokus pada pengumpulan poin saja, melainkan juga pada proses internalisasi dalam pemikiran dan keseharian para pelakunya. Perlu menjadi catatan bahwa evaluasi penerapan sistem merit dilakukan melalui skoring/penilaian atas terpenuhinya aspek-aspek ideal yang dibuktikan salah satunya dengan dokumen administrasi. Oleh karenanya, kemampuan pengelola kepegawaian untuk menyiapkan berbagai prasyarat penilaian turut berpengaruh pada penilaian sistem merit di BKPSDM.

Diketahui:  
Sekretaris BKPSDM

  
**Hendrawati, SE**

NIP. 19720729 200604 2 003

Notulis,



**Lendrawati, A.Md**

NIP. 19810219 200904 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jln. H.Ilyas Yacub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon/Faximile (0756) 22245

Laman : <https://bkpsdm.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : [bkpsdm@pesisirselatankab.go.id](mailto:bkpsdm@pesisirselatankab.go.id)

Pesisir Selatan, 01 Maret 2024

Nomor : 800 / 17 / BKPSDM 2024  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Rapat

Yth. 1. Sekretaris BKPSDM  
2. Staf Sekretariat  
di  
Tempat

Dalam Rangka monitoring dan evaluasi kinerja Sekretariat BKPSDM bulan Februari, maka bersama ini kami undang seluruh staf Sekretariat untuk hadir pada:

hari/tanggal : Senin/ 04 Maret 2024  
waktu : 09.00 s/d Selesai  
tempat : Ruang Sekretaris

Demikian disampaikan, atas kehadiran Saudara tepat pada waktunya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia



Hendrawati, SE  
NIP. 19720729 200604 2 003

## NOTULEN RAPAT

Hari/tanggal : Senin, 04 Maret 2024  
Pukul : 09.00 s/d Selesai  
Tempat : Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Pimpinan Rapat : Sekretaris Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM

### Kesimpulan Rapat

1. Yang belum selesai mengentrikan anggaran ke master paket di aplikasi e-simbangda, agar segera menyelesaikan. Disarankan kepada operator e-simbangda agar lebih aktif menginput dan mengupload dokumen dan PPTK agar mengontrol operator dan memfasilitasi kebutuhan operator terkait e-simbangda.
2. Serapan anggaran masih rendah secara keseluruhan, hal ini terkendala dengan aplikasi SIPD RI. Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan bersama bendahara agar berkoordinasi dengan BPKPAD.
3. Hasil capaian kinerja Eselon II bulan Februari 2024 :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET tahun 2024	Target Bulan Februari 2024	Realisasi Bulan Februari 2024	Keterangan
1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP BKPSDM	A (90)	A (89.99)	-	Penilaian oleh Inspektorat
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi BKPSDM	90 (sangat tinggi)	45	45	
3.	Meningkatnya Daya Saing ASN	Indeks Profesionalitas ASN	70 (sedang)	30%	30%	
		Indeks Merit Sistem	255 (baik)	30%	50%	

4. Inovasi yang akan dilakukan pada tahun 2024 merupakan inovasi lanjutan dari tahun 2023 yang belum final pengerjaannya dan Inovasi Baru di tahun 2024, yaitu : ISI BBM yang merupakan singkatan dari Integrasi Sistem Informasi Birokrasi Berbasis Meritokrasi

5. Bagi ASN yang ditunjuk untuk percepatan pencapaian target **Nilai Kematangan Inovasi**, agar melengkapi dokumen-dokumen pendukung dan lebih intens berkoordinasi dengan pengampu di Bapedalitbang.

Diketahui:  
Sekretaris BKPSDM



**Hendrawati, SE**  
NIP. 19720729 200604 2 003

Notulis,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lendrawati, A.Md.', written over the word 'Notulis,'.

**Lendrawati, A.Md**  
NIP. 19810219 200904 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jln. H,Ilyas Yacub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon/Faximile (0756) 22245

Laman : <https://bkpsdm.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : [bkpsdm@pesisirselatankab.go.id](mailto:bkpsdm@pesisirselatankab.go.id)

Pesisir Selatan, 16 April 2024

Nomor : 800 / 21 / BKPSDM 2024  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Rapat

Yth. 1. Sekretaris BKPSDM  
2. Staf Sekretariat

di  
Tempat

Dalam Rangka monitoring dan evaluasi kinerja Sekretariat BKPSDM bulan Maret, maka bersama ini kami undang seluruh staf Sekretariat untuk hadir pada:

hari/tanggal : Rabu/ 17 April 2024  
waktu : 09.00 s/d Selesai  
tempat : Ruang Sekretaris

Demikian disampaikan, atas kehadiran Saudara tepat pada waktunya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia



Hendrawati, SE

NIP. 19720729 200604 2 003

## NOTULEN RAPAT

Hari/tanggal : Rabu, 17 April 2024  
Pukul : 09.00 s/d Selesai  
Tempat : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Pimpinan Rapat : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

### Kesimpulan Rapat

1. Dari hasil monitoring di aplikasi e-simbangda, master paket dan anggaran telah selesai semua dientrikan.
2. Selanjutnya para admin di harapkan agar segera mengupload eviden.
3. Pelaksanaan APBD Triwulan I Tahun 2024 :

N O	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	% KEU	% FISIK
1	Belanja Operasi	5.470.820.402	1.286.295.570	23,51%	25%
2	Belanja Modal	-	-	-	-
3	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
4	Belanja Transfer	-	-	-	-
	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>5.470.820.402</b>	<b>1.286.295.570</b>	<b>23,51%</b>	<b>25%</b>

4. Permasalahan yang dihadapi :
  - Tidak tersedianya dana untuk melaksanakan seleksi terbuka dan pengadaan CPNS/PPPK.
  - Belum maksimalnya jaringan pada aplikasi SIPD RI, yang sering mengalami kendala sehingga pencairan anggaran sangat terpengaruh.

5. Upaya yang dilakukan :

Melakukan pergeseran anggaran dan dalam catatan untuk perubahan anggaran nanti.

Demikian notulen rapat ini dibuat dan terimakasih



Diketahui:  
Sekretaris BKPSDM

Hendrawati, SE

NIP. 19720729 200604 2 003

Notulis

Lendrawati, A.Md

NIP. 19810219 200904 2 002



**Tabel 1.1**  
**Jumlah Data PNS BKPSDM Tahun 2021 - 2023**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

Tahun	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
2021	43	22	21
2022	51	22	24
2023	38	17	21

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian BKPSDM

Saat ini Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah sebanyak 38 orang PNS dan 8 orang Tenaga Honor, secara Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Esselonering terdiri dari 1 Kepala Badan, 1 Sekretaris, 3 Kepala Bidang dan 2 Kasubbag. Berdasarkan Golongannya pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Data PNS BKPSDM Tahun 2023**  
**Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin**

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah PNS dan Honorer
		Laki-Laki	Perempuan	
1	IV/c	1	-	1
2	IV/b	-	-	-
3	IV/a	-	-	-
<b>Sub Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
4	III/d	3	7	10
5	III/c	3	4	7
6	III/b	1	5	6
7	III/a	7	3	10
<b>Sub Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>19</b>	<b>35</b>
8	II/d	-	2	2
9	II/c	2	-	2

10	II/b	-	-	-
11	II/a	-	-	-
<b>Sub Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>21</b>	<b>38</b>
13	Honorar	4	4	8
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>26</b>	<b>46</b>

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Data PNS BKPSDM Tahun 2023**  
**Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin**

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah PNS dan Honorar
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SD	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-
3	SMA Sederajat	5	3	8
4	D2	-	1	1
5	D3	1	2	4
6	D4	-	1	1
7	S1	10	15	24
8	S2	4	4	8
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>26</b>	<b>46</b>

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian

#### d. Sarana Prasarana

Terkait dengan sarana prasarana yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, di dukung

oleh Inventarisasi Sarana Prasarana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

**Tabel 1.4 Inventarisasi Sarana Prasarana BKPSDM Tahun 2023**

No	Sarana Prasarana	Jumlah
A	Peralatan dan Mesin	
	Alat-alat Angkutan (Mobil Dinas)	2 Unit
	Kendaraan Roda 2	4 Unit
B	Gedung dan Bangunan	
	Bangunan Gedung Kantor	1 Unit

Mobil Dinas yang saat ini di jadikan operasional yakni Mobil Innova Tahun 2012 yang di pegang oleh Kepala Badan dan Mobil Avanza Tahun 2006 yang di pegang oleh Sekretaris. Dimana Kondisi dari Mobil Operasional Avanza yang di pegang oleh Sekretaris, kondisinya rusak sedang, yakni pemakaian bahan bakar boros, banyak goresan bahkan karatan dibagian bawah permukaan mobil, sistem power steering bermasalah, AC kurang dingin, sering keluar suara aneh seperti berdesis dan kadang timbul getaran dengan bunyi yang berisik.

Untuk kendaraan roda dua terdiri dari 4 kendaraan, tahun 2004 yang dipegang oleh Pengadministrasi Perkantoran, tahun 2005 yang dipegang oleh Kabid Mutasi dan Promosi ASN, tahun 2006 yang dipegang oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan tahun 2007 yang di pegang oleh Analis Kepegawaian Ahli Muda.

Kondisi Bangunan Kantor, beberapa titik ada atap yang bocor untuk area loteng di Bidang Mutasi, dimana lotengnya mulai terbuka dan menjulai kebawah. Namun untuk sementara telah di siasati di tutup dengan seng. Pipa saluran air ada yang pecah di bagian dekat tempat parkir. Musholla, Ruang Pelayanan dan Ruang rapat/aula menyatu dalam satu bangunan gedung kantor.

### 1.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pencapaian tujuan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat

kaitannya dengan keberadaan institusi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan yang membantu Kepala Daerah dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya aparatur masih harus ditingkatkan secara kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
2. Proses seleksi, penerimaan dan penempatan CPNS belum sepenuhnya berdasarkan analisis kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan;
3. Pelayanan administrasi kepegawaian masih perlu ditingkatkan sehingga pelayanan kepegawaian berjalan dengan baik, bersih dan transparan;
4. Sarana dan prasarana harus ditingkatkan, khususnya bangunan gedung kantor yang representatif untuk mewujudkan manajemen kepegawaian yang baik dan peralatan berbasis teknologi.

#### **1.6 Isu Strategis**

Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu tentang pertanggung jawaban instansi pemerintah yang didasarkan pada ukuran efisien, efektif dan ekonomis.

Berkaitan dengan peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang kepegawaian, isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi isu strategi sebagai berikut :

a. Rendahnya kualitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara

Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki permasalahan dengan rendahnya kompetensi. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya pemetaan potensi kepada sebagian PNS di Kab. Pesisir Selatan. Hasil dari pemetaan potensi diperoleh bahwa hanya sepertiga dari jumlah pegawai yang telah dipetakan memperoleh hasil yang baik. Sehingga ini merupakan masalah yang harus ditanggapi oleh Pemerintah Kab. Pesisir Selatan.

b. Belum optimalnya database kepegawaian

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan berusaha mengembangkan sistem aplikasi kepegawaian atau SIMPEG. Simpeg sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada seluruh personalia yang ada karena pegawai merupakan aset penting penyelenggaraan organisasi yang perlu dikelola dengan baik.

Pengelolaan pegawai yang baik dalam lingkup kecil akan meningkatkan kinerja pegawai, dan dalam lingkup yang besar akan membawa perbaikan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Namun dalam lingkup yang lebih besar akan membawa perbaikan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

c. Penataan dan penempatan pegawai Perangkat Daerah (PD) yang belum optimal.

Penataan dan penempatan pegawai di PD belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat adanya PNS di PD yang memiliki banyak pegawai dan ada yang kekurangan pegawai. Penataan dan penempatan pegawai di PD disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Hal ini dilakukan dengan cara menggunakan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

d. Masih rendahnya disiplin aparatur

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman. Kecenderungan banyaknya ditemukan kasus disiplin yang dilakukan oleh PNS di Kabupaten Pesisir Selatan terutama terkait

**Tabel 3.5**  
**Target dan Capaian Nilai IP ASN 2019-2023**

Tahun	Target	Capaian Realisasi Nilai IP ASN	Kategori
2019	57	36,00	sangat rendah
2020	57	56,00	rendah
2021	57	48,78	sangat rendah
2022	57	51,89	rendah
2023	58	66,09	rendah

Sumber : Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026

**Gambar 3:**  
**Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023**

KANTOR REGIONAL XII BKN  
Lampiran II Surat Dinas  
Nomor : 1097/B-BJ.03.02/SD/KR.XII/2023  
Tanggal : 25 Oktober 2023

**HASIL PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN TAHUN 2022**  
Nilai Rata-Rata Per Dimensi di Instansi Wilayah Kerja  
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

JUMLAH INSTANSI	JUMLAH PNS YANG DIUKUR	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI INDEKS	KATEGORI
41	189.237	21,18	14,78	21,44	5,00	62,40	Rendah

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Instansi  
di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

NAMA INSTANSI	JUMLAH PNS YANG DIUKUR	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI	KATEGORI
Pemerintah Kota Bukittinggi	2.184	20,97	37,51	25,03	5,00	88,51	Tinggi
Pemerintah Kota Panaman	2.293	21,35	34,88	24,95	5,00	85,96	Tinggi
Pemerintah Kab. Sijunjung	3.217	21,19	31,79	26,20	5,00	83,18	Tinggi
Pemerintah Kab. Tanah Datar	4.082	21,21	28,83	24,66	4,99	79,79	Sedang
Pemerintah Kota Batam	5.285	21,02	28,20	24,93	4,89	79,14	Sedang
Pemerintah Kota Pekanbaru	6.080	21,21	29,08	23,09	5,00	78,38	Sedang
Pemerintah Kota Padang Panjang	1.790	20,93	28,39	25,00	5,00	77,32	Sedang
Pemerintah Kab. Dharmasraya	3.088	21,31	21,04	24,36	5,00	71,71	Sedang
Pemerintah Provinsi Riau	13.965	21,51	17,06	24,66	5,00	69,33	Rendah
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	6.451	21,42	15,81	24,16	5,00	68,09	Rendah

Sumber : Laporan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, di Pekanbaru

Berdasarkan laporan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 di Instansi Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru di dapat hasil Indeks profesionalitas ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 yakni sebesar 66,09 % dengan capaian 113,95 %. Berdasarkan data Capaian Indeks Profesionalitas (IP) ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat bahwa capaian nilai IP ASN dalam kategori rendah. Terdapat beberapa penyebab rendahnya capaian nilai IP ASN ini, salah satunya adalah pemetaan kompetensi yang dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) masih belum maksimal.

**Tabel 3.7**

**Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Utama  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN	1. Indeks IP ASN	58 (sangat rendah)	66.09 (rendah)	113.95
		2. Indeks Merit Sistem	250 (baik)	243.5 (kurang)	97.40

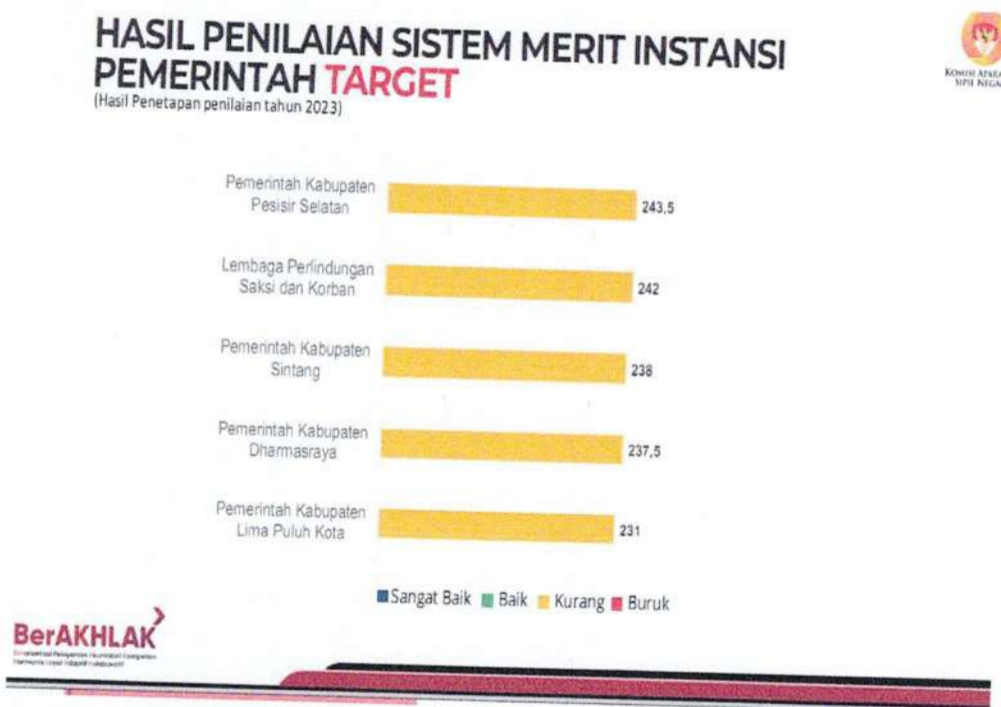
**2) Indeks Merit Sistem ASN**

Indek Merit Sistem sebesar 243.5 (kurang) dengan capaian 97.40 %. Berdasarkan data Indeks Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat bahwa capaian nilai IP ASN dalam kategori kurang.

Delapan Aspek Penilaian Sistem Merit, Berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 40 Tahun 2018 dan Per-KASN Nomor 9 Tahun 2019 :

1. Perencanaan Kebutuhan pegawai dihitung secara tepat dengan Anjab dan ABK
2. Pengadaan pegawai dilakukan secara terbuka dan kompetitif.
3. Pengembangan karier bertumpu pada pengembangan kompetensi dan kinerja melalui Manajemen Talenta.
4. Promosi dan mutasi berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
5. Manajemen Kinerja dinilai secara objektif dan terukur, serta digunakan sebagai pertimbangan karier.
6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin. Tunjangan berdasarkan kinerja; penghargaan rutin untuk pegawai berprestasi; penegakan kode etik dan kode perilaku.
7. Perlindungan dan pelayanan pegawai.
8. Sistem informasi.

Gambar 4. Hasil Penilaian Sistem Merit BKPSDM Kab. Pesisir Selatan



Sumber : Hasil Penilaian Sistem Merit KASN Tahun 2023

### 3.3.3 Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah

Nilai Kematangan Inovasi merupakan Tingkat keterisian parameter dan eviden secara benar dan sesuai. Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award) yang disingkat dengan IGA adalah :

1. Memotivasi untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai;
2. Mendorong penerapan good governance;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Gambar 5 : Nilai Inovasi Tahun 2023 BKPSDM Kab. Pesisir Selatan

No	Instansi	Program/Inovasi	Status	Nilai	Kategori	Tingkat
		Kolaborasi Pola SMA (Sekolah Musholla Asrama) di UPT SMPN 7 Sutura	Tidak Terkirim	69.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan < 70	Tinggi
9	Dinas Pertanian	DOVAC (Door To Door Vaccination Action)	Terkirim	92.00	Approve	Sangat Tinggi
10	Dinas Kesehatan	PASAN MANDEH	Terkirim	91.00	Approve	Sangat Tinggi
11	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Aplikasi SIPPORA (Sistem Informasi Pariwisata, Pemuda dan Olahraga)	Terkirim	89.00	Approve	Sangat Tinggi
12	Dinas Perhubungan	FLLAJ Pessel	Terkirim	87.00	Approve	Sangat Tinggi
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SILPIA (Sistem Inovasi Layanan Penerbitan Identitas Anak)	Terkirim	87.00	Approve	Sangat Tinggi
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SIMANTAP PESSSEL	Terkirim	87.00	Approve	Sangat Tinggi
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelayanan Pensiun Berbasis Digital (E-Pensiun)	Terkirim	85.00	Approve	Sangat Tinggi
16	Sekretariat Daerah	Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	Terkirim	84.00	Approve	Sangat Tinggi
17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Aplikasi SI-PENDEKAR (Sistem Informasi Pemadam Kebakaran)	Terkirim	81.00	Approve	Sangat Tinggi
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RUMPIN LICIK (Rumah Pintar Literasi Cilik)	Terkirim	74.00	Approve	Tinggi
19	Dinas Perikanan dan Pangan	FORUM KOMUNIKASI UNIT PEMBENIHAN	Tidak Terkirim	63.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan < 70	Tinggi
20	Sekretariat DPRD	SIPINTAR (Sistem Pengelolaan Integrasi Ansig Digital)	Tidak Terkirim	51.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan < 70	Cukup
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIJARI-PAS (Sistem Informasi Jaringan Irigasi Pesisir Selatan)	Tidak Terkirim	41.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan < 70	Cukup
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KATANA ( Keluarga Tangguh Bencana )	Tidak Terkirim	41.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan < 70	Cukup

Platform ini tidak dapat diakses secara elektronik yang diarahkan oleh Badan Serbikatasi Elektronik (BSE) BSSN

Sumber : Surat Sekretariat Daerah tanggal 10 Januari 2024, Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023.

**Tabel 3.8**  
**Hasil Pengukuran Capaian Inovasi**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi	100	85 (sangat tinggi)	85 (sangat tinggi)

Pada Tahun 2023 kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan nilai inovasi 100, akan tetapi realisasi nilai kematangannya yakni 85 dengan prediket sangat tinggi, yang di sebabkan oleh :

1. Tidak adanya pengembangan aplikasi Pensiun Berbasis Digital yang mana penambahan menu pada Aplikasi SIMPEG, dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pensiun hanya mengupload dokumen pada Aplikasi melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian di Instansi kerja masing – masing.
2. Kesulitannya Sekretariat minta dokumen ke bidang-bidang untuk di Upload dan tidak tersedianya kelengkapan ke Inspektorat tepat pada waktunya, dll
3. Kurangnya motivasi Tentang kelanjutan inovasi tahun 2022 yakni digitaliasi pensiun

Gambar 6 : Nilai Inovasi Tahun 2021-2022 BKPSDM Kab. Pesisir Selatan

#	Nama Penda	Nama Inovasi*	Tahapan Inovasi*	Urusan Pemerintahan Utama	Waktu Uji Coba Inovasi Daerah*	Waktu Penerapan Inovasi Daerah*	Estimasi Skor Kematangan	Aksi
1	Kabupaten Pesisir Selatan	Pelatihan Pesisir Berbasis Digital (E-Pesir)	Penerapan	Kepegawaian	01/09/2022	18/10/2022	85,00	
2	Kabupaten Pesisir Selatan	Pembekalan Pra Hilah PHS	Penerapan	Kepegawaian	01/10/2020	14/01/2021	90,00	

Sumber : Data Bappedalitbang 2024 di <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>

### 3.4 Capaian Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### 1) Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

##### 3.5 Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Pada tahun 2023 untuk meningkatnya pelayanan pegawai dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan cara menyebarkan formulir survey melalui link <http://forms.gle/eA5vB7EJSsfNHRj98> pada triwulan II dan triwulan IV dengan target 65 % dengan realisasi 80.07% atau capaiannya 123.18%, dengan jumlah berkas yang dilayani yaitu sebagai berikut :

- Tingkat kepuasan pelayanan kepangkatan  
 Pada tahun 2022 dengan sebanyak 1400 berkas, namun bisa dilayani dan diproses secara tepat waktu untuk diterbitkan SK Kenaikan Pangkat sebanyak 1123 berkas atau 80.21%, sedangkan pada tahun

kinerja untuk sasaran strategis ini sebesar 89.23 % dari target sebesar 90%. Dibandingkan tahun 2022 Jumlah jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 5.488 orang dari 6.445 orang dan yang jabatan belum ada kompetensinya (jabatan fungsional umum) adalah 957 orang. Realisasi kinerja untuk sasaran strategis ini sebesar 85.15 % dari target sebesar 30 %. Untuk tahun 2023 diukur semua ASN Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga pencapaian tahun 2023 tinggi dari tahun 2022.

Gambar 7 : Jumlah ASN Menurut Jabatan di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	JENIS JABATAN	PNS	PPPK	ASN
1	TENAGA GURU	3073	1624	4697
2	TENAGA KESEHATAN	1008	24	1032
3	TENAGA TEKNIS	369	55	424
4	STRUKTURAL	382	0	382
5	FUNGSIONAL UMUM	789	0	789
TOTAL		5621	1703	7324
MERIT SISTEM		85.96%	100.00%	89.23%

Tabel. 3.10

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Manajemen Sistem Karir ASN Berdasarkan Merit Sistem Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya manajemen sistem karirASN berdasarkan Merit System	Jabatan yang sesuai dengan kompetensi jabatan dan anjab	%	90	85.15	243,5 (kurang)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada BAB III, Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 yaitu:

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (tiga) Sasaran yang telah ditetapkan, 2 (dua) sasaran memperoleh capaian di atas 100 % atau lebih. Sedangkan untuk sasaran ke 3 dengan capaian AKIP BKPSDM A dengan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan, semuanya berhasil mencapai target bahkan ada indikator yang capaiannya melebihi 100 %.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Anggaran Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 6.441.358.194,- atau 93.65 % dari target alokasi Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 6.877.919.700,-

Secara umum dari 3 (tiga) sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 menunjukkan kinerja yang baik. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen ASN, sehingga sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dapat diwujudkan.

Kemandirian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan melakukan sumberdaya manusia dalam satu sisi tentunya memberikan kebebasan dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya manusia yang dimilikinya, tetapi disisi lain apabila tidak dapat memanfaatkan dengan baik kewenangan yang dimiliki akan menyebabkan penurunan kualitas profesional aparatur.

Untuk memberdayakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai bagian dari manajemen kepegawaian nasional, di perlukan perumusan kebijakan manajemen kepegawaian secara komprehensif berdasarkan:

1. Penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah harus tetap menjamin peningkatan dan keserasian dengan manajemen kepegawaian nasional, dengan menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi.
2. Pengembangan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yang rasional perlu dilakukan analisis jabatan, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan dan pola karier serta prestasi kerja.

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategis pembangunan, sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum program pembangunan daerah ke depan.

Dengan demikian Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana kerja tahunan (RKT) dan menjadi pedoman untuk dilaksanakannya melalui monitoring dan evaluasi kinerja serta proses penyusunan Laporan Kinerja OPD.

#### 4.2. Saran

1. Untuk meningkatkan mengembangkan kompetensi ASN baik itu Manajerial, Teknis dan Sosial sangat dibutuhkan penambahan anggaran, karena masih rendahnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan Indikator Kinerja Utama BKPSDM yang mana tertuang didalam Indikator Utama RPJMD Tahun 2021 - 2026 Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Perlunya optimalisasi pelaksanaan manajemen ASN.
3. Perlunya pengembangan digitalisasi untuk pelayanan administrasi ASN secara online, yang saat ini akan di daftarkan untuk masuk dalam Inovasi Tahun 2024 yakni **ISI BBM** yang merupakan singkatan dari **Integrasi Sistem Informasi Birokrasi Berbasis Meritokrasi**.

Painan, 15 Februari 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Pesisir Selatan



YOZKI WANDRI S.Pi.M.Si

NIP. 19750101 200003 1 003